

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainability Report adalah laporan publik yang disusun oleh perusahaan untuk menyediakan informasi mengenai gambaran posisi dan aktivitas perkembangan perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 berisikan kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dalam bentuk laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Setiap perusahaan perlu menerapkan pengungkapan *Sustainability Report* yang tujuannya untuk membangun ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan *Sustainability Report* maka dampaknya akan dirasakan dari beberapa aspek, salah satunya yaitu hilangnya kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersangkutan dengan perusahaan seperti, investor, pelanggan, pegawai, dan pihak eksternal yang tidak lagi berminat untuk melakukan investasi maupun berhubungan kembali dengan perusahaan yang tidak terbuka dalam praktik pengungkapan keberlanjutannya (Arifin, 2024). Umumnya, perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencari laba, serta membantu *stakeholder* dalam memperbaiki perkembangan kinerja perusahaan. Kini paradigma para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan telah berubah, dimana fokusnya tidak hanya pada perolehan laba saja (*single line*), melainkan juga memperhatikan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan lingkungan sekitar perusahaan yang bisa disebut *triple bottom line* (DGB Group, 2023).

Upaya perusahaan dalam memperhatikan tanggung jawabnya terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai pembuktiannya diungkapkan dalam bentuk *Sustainability Report* agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dan kemajuan atas aktivitas operasionalnya. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya operasionalnya dan dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) di situsnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, membahas lebih detail dalam mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menyatakan bahwa berisikan beberapa poin sebagai berikut, (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Hal tersebut cukup menjelaskan bahwa pentingnya dalam mengungkapkan *Sustainability Report* untuk perusahaan yang terpublish. Namun, masih banyak perusahaan yang *go public* belum menerapkan laporan keberlanjutan di setiap tahunnya seperti beberapa perusahaan pada PT Garuda Metallindo Tbk (BOLT), PT Indospring Tbk (INDS), dan Grand Kartech Tbk (KRAH) yang hanya mencantumkan laporan tahunan saja. Hal ini mengakibatkan perusahaan dapat mengurangi kepercayaan dari pihak yang bersangkutan seperti investor, karyawan, maupun pelanggan karena informasi yang dimiliki perusahaan sangat terbatas. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan biaya pendanaan untuk modal,

maupun investasi dikarenakan pihak investor mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek ESG (*Environment, Social, Governance*).

Berbeda dengan beberapa Perseroan yang selalu *update* dengan laporan keberlanjutannya dari tahun ke tahun, salah satunya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, (ICBP) yang menggunakan GRI *Universal Standards* terbaru tahun 2021. Atas kesadaran ICBP pada berbagai gangguan lingkungan, sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh guncangan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, konflik geopolitik serta ketahanan pangan, maka perusahaan merasa pentingnya membangun ketangguhan bisnis untuk meraih masa depan yang berkelanjutan (*Sustainability Report ICBP, 2023:9*). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan bentuk tanggung jawab dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat atas kegiatan operasionalnya, serta memperkuat kepercayaan para *stakeholder*.

Faktor-faktor yang memengaruhi *Sustainability Report* didasari oleh *Global Reporting Initiative (GRI Standards)* berisikan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan, isi laporan, dan topik yang berisikan isu-isu penting dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*GRI Standards Foundation, 2021*). Selain itu, terdapat *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* yang menyediakan standar pelaporan berbasis industri secara finansial serta dapat juga dipengaruhi oleh *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)* yang memberikan panduan pelaporan terkait risiko dan peluang iklim. Dari beberapa faktor yang mendasari pengaruh *Sustainability Report* tersebut, terdapat beberapa penentu dari internal perusahaan untuk memberikan keputusan dan sebagai pendorong atas kualitas serta terciptanya laporan keberlanjutan seperti dewan direksi, komite audit, komisaris independen, manajemen eksekutif, departemen keberlanjutan, departemen keuangan, dan departemen kepatuhan (Latif et al., 2023).

Pada penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi *Sustainability Report* sebagai berikut, *pertama*, dewan komisaris independen adalah “Dewan” yang berarti dua orang anggota atau lebih bertugas sebagai memutuskan sesuatu, memberikan nasehat serta saran, dan sesuatu hal lain yang perlu di diskusikan dan disepakati. Sedangkan “Komisaris” adalah suatu jabatan di dalam perusahaan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berperan sebagai pengawas untuk memantau aktivitas perusahaan atas kesesuaiannya terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, “Independen” artinya suatu sikap yang ada pada 1 pihak/seseorang yang bersifat tidak terikat pada pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain, dan mampu berdiri sendiri (Hasanudin et al., 2020).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen adalah anggota badan perusahaan yang terdiri dari beberapa orang yang disahkan oleh RUPS untuk ditugaskan dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal perusahaan. Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 120, mengatur tentang komisaris independen. Didalamnya terdapat beberapa tugas yang dilaksanakan yaitu, mengawasi penetapan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan perusahaan, serta memberikan nasehat secara detail atas perencanaan strategis yang disusun oleh perusahaan dan anggaran yang akan dialokasikan oleh perusahaan.

Jika perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris independen yang banyak maka perusahaan dapat menciptakan pengawasan secara ketat. Akibatnya, operasional perusahaan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tingginya profitabilitas perusahaan akan disorot oleh para *stakeholder* karena memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif. Hal tersebut harapannya perusahaan mampu memberikan *responsibility* secara sosial dan lingkungan,

dalam bentuk pengungkapan *Sustainability Report* atas dukungan penggunaan dana yang optimal. Namun, jika jumlah dewan komisaris independen terhitung sedikit, maka pengawasan terhadap isu keberlanjutan cenderung lemah dan risikonya digunakan hanya sebagai alat pencitraan, bukan laporan yang sebenarnya terjadi. Hal ini seringkali menimbulkan penilaian terhadap perusahaan yang cenderung negatif, akibatnya dapat meragukan investor atas keseriusan perusahaan terhadap isu keberlanjutannya (Setiawan & Ridaryanto, 2022).

Nurhakiki et al., (2024) menyatakan bahwa peran dewan komisaris independen berdampak positif dalam mengawasi pengelolaan perusahaan terkait tanggung jawab pada hal perekonomian, sosial, serta lingkungan melalui pengungkapan *Sustainability Report*. Sementara Sofa et al., (2020) mengungkapkan bahwa berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 dewan komisaris independen memiliki tugas utama melindungi kepentingan pemegang saham dan mengawasi kinerja direksi melalui aspek keuangan, sehingga tidak dapat dibuktikan berpengaruh langsung terhadap luasnya pengungkapan *Sustainability Report*. Selanjutnya faktor yang *kedua*, komite audit adalah beberapa anggota yang berada didalam perusahaan atau organisasi yang menjalankan tugas sebagai pelaksana suatu tindakan, penyelidikan, maupun pelaporan yang bersifat independen dan sistematis. Tujuannya yaitu menetapkan kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan, menjaga efektivitas pemeriksaan internal, dan juga mengurangi dampak negatif risiko perusahaan atau organisasi (Lendengtariang & Dwinato, 2023).

Pusat informasi tentang *Sustainability Report* disusun oleh beberapa perwakilan departemen yang sudah ditugaskan sesuai bidangnya (keuangan, lingkungan, sosial, tata kelola, dan sumber daya) untuk mempertahankan tanggung jawab dan citra perusahaan. Saat proses penyusunan laporan keberlanjutan ini berlangsung, komite audit membantu dewan komisaris dalam pemantauan adanya risiko *Environmental, Social,*

and Governance (ESG) yang akan diungkapkan dengan cara mengidentifikasi, serta mengevaluasi penyusunan laporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk laporan keuangan dan standar GRI untuk laporan keberlanjutan (Pasaribu & Soeratin, 2024).

Peran komite audit sangat penting dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar tersebut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga dapat membangun kepercayaan para pemangku kepentingan (Pratiwi, 2023). Kepercayaan ini menjadi faktor pendorong minat investor untuk menanamkan modal, yang dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dengan dukungan modal yang memadai, perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja operasional yang berdampak positif terhadap pertumbuhan laba dan profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif, termasuk dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial dan lingkungan yang kemudian diungkapkan secara transparan dalam *Sustainability Report*. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat (Pramita & Budiasih, 2025).

Ketika anggota komite audit memiliki jumlah yang banyak serta memiliki kinerja yang sehat dan dapat berjalan dengan baik, maka akan tercipta sinyal positif dari citra perusahaan, selain itu perusahaan juga akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Sihombing & Nurhaliza, 2025). Hal ini menjadikan kualitas pengungkapan *Sustainability Report* semakin luas dan akurat dalam pengungkapannya. Tercapainya kualitas *Sustainability Report* yang baik, maka perusahaan akan memiliki informasi yang lebih *valid*, terpercaya, dan dapat mengurangi risiko adanya *greenwashing* atau tindakan

kecurangan yang disengaja dalam laporan keberlanjutan perusahaan (Velte, 2024). Sebaliknya, jika komite audit bekerja dengan tidak baik bisa dianggap sinyal negatif karena dapat melakukan *greenwashing*, yaitu tindakan yang menyatakan peduli terhadap lingkungan secara berlebihan atau tidak sejalan dengan praktik bisnis yang dilakukan pada suatu perusahaan. Hal ini dapat memicu citra perusahaan yang negatif, di mana para *stakeholder* dan masyarakat akan memandang buruk serta hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan (Gregory, 2024).

Saputri et al., (2022) membuktikan bahwa jika perusahaan memiliki anggota komite audit dengan jumlah yang banyak, maka perusahaan dapat terbantu dalam peningkatan citra perusahaannya dan peningkatan kualitas laporan keberlanjutan yang berisikan segala informasi tentang pertanggung jawaban sosial. Berbeda dengan penelitian yang dikemukakan oleh Tobing et al., (2019) kurangnya kompetensi anggota komite audit bisa berpengaruh terhadap turunnya luas pengungkapan laporan keberlanjutan yang sifatnya sukarela.

Faktor yang *ketiga*, ukuran perusahaan adalah suatu ukuran dengan kategori besar, menengah, maupun kecilnya perusahaan yang dapat dilihat di laporan keuangan dengan diukur melalui total aktiva, total penjualan, dan nilai pasar saham. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelompokan usaha didasarkan pada kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan. Adapun yang termasuk ke dalam usaha mikro memiliki aktiva paling banyak sebesar Rp 50.000.000 dan Rp 300.000.000 untuk hasil penjualan dalam satu tahun. Usaha kecil untuk aktiva paling banyak sebesar Rp 500.000.000 dan Rp 2.500.000.000 untuk hasil penjualan paling banyak setiap tahunnya. Sedangkan, usaha menengah sebanyak Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000 dan Rp 50.000.000.000 untuk hasil paling banyak atas penjualan tahunannya . Peraturan yang sesuai dengan

UU tersebut biasanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan modal, maupun syarat izin usaha (Farisi et al., 2022).

Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung lebih memiliki kekuatan dalam beroperasi dan lebih banyak memiliki sumber daya. Ukuran perusahaan yang besar cenderung menjalankan aktivitas yang lebih banyak, kompleks, dan luas dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya beroperasi di banyak wilayah untuk mengelola produksi, distribusi, pemasaran, maupun layanan konsumen dengan skala yang cukup besar. Hal tersebut mempengaruhi banyaknya jumlah karyawan yang akan banyak juga kebutuhan fasilitasnya serta aktivitas yang berskala besar akan selalu menciptakan dampak negatif pada sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan harus mampu memberikan bukti bahwa adanya aktivitas tersebut akan di pertanggungjawabkan melalui bentuk pengungkapan *Sustainability Report* dengan mengacu pada standar GRI. Ini menyebabkan perusahaan akan mengalami pengeluaran biaya-biaya yang dibutuhkan, namun dapat memberikan sinyal positif mengenai stabilitas keberlanjutan perusahaan agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat demi mempertahankan citra perusahaan yang baik. Selain itu juga dapat meminimalisir perselisihan berbasis risiko antara perusahaan dengan masyarakat (Bolibok, 2024).

Sofa et al., (2020) menyatakan bahwa perusahaan besar yang memiliki banyak aset dan banyak aktivitas serta berhubungan dengan lebih banyak *stakeholder*, terbukti mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lebih luas sebagai alat komunikasi dan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder*. Sementara, Dewi (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan rata-rata memiliki total aset besar untuk melakukan kegiatan operasionalnya namun tidak sungguh-sungguh mengungkapkan *Sustainability Report* karena masih bersifat sukarela.

Pengungkapan laporan keberlanjutan atas dasar standar GRI, bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kekuatan ketika adanya perubahan sosial. Hal ini dapat membuktikan bahwa dengan legitimasi yang tinggi dapat meningkatkan citra perusahaan atas kepercayaan dan loyalitas *stakeholder*. Selain itu, masyarakat akan mendukung perusahaan untuk tetap berjalan dalam melanjutkan aktivitas operasionalnya dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Budiarto et al., (2023) & Nurhakiki et al., (2024) menemukan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Report*. Sementara, Sofa et al., (2020) Liana (2019) & Setyawan et al., (2018) memaparkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap *Sustainability Report*.

Sujatnika et al., (2023) Wulandari et al., (2021) Saputri et al., (2022) & Budiarto et al., (2023) menghasilkan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Berbeda dengan Sofa et al., (2020) & Tobing et al., (2019) memaparkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Sujatnika et al., (2023) Budiarto et al., (2023) dan Putra et al., (2023) menemukan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Sementara, Saputri et al., (2022) & Dewi (2019) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Dewasa ini, isu-isu mengenai pentingnya penyusunan dan pengungkapan *Sustainability Report*, terdapat sejumlah perusahaan manufaktur yang belum melakukannya. Salah satunya seperti PT Garuda Metallindo Tbk (BOLT), di mana praktik pengungkapan keberlanjutan tidak dilakukan karena rendahnya

kesadaran akan pentingnya pelaporan bagi reputasi dan hubungan *stakeholder*. Perusahaan hanya mempertahankan citranya dengan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui laporan tahunan atau laporan terintegrasi. Kondisi ini menyulitkan *stakeholder* dalam memperoleh informasi lengkap dan memadai mengenai komitmen sosial maupun lingkungan perusahaan (Wahyudi, 2021).

Selain itu, berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian yang menguji praktik pengungkapan *Sustainability Report*, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Sustainability Report* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan data pada satu periode di tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan *Sustainability Report*?
2. Apakah ada pengaruh antara komite audit dengan pengungkapan *Sustainability Report*?
3. Apakah ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *Sustainability Report*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

2. Untuk menganalisis pengaruh antara komite audit terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi dan pengembangan teori, terutama berkaitan dengan Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi di bidang organisasi dan akuntansi lingkungan perusahaan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya terkait dengan *Sustainability Report* pada masa yang akan datang.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan, khususnya dalam mengelola operasional yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi apabila pengungkapan *Sustainability Report* tidak dilakukan secara memadai. Oleh karena itu, manajemen perlu memperhatikan pentingnya pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi pengelolaan perusahaan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pendapaian hasil akhir semata. Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti empiris mengenai praktik pengungkapan *Sustainability Report* pada sektor manufaktur di Indonesia, serta menegaskan urgensi pelaporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholder* dan masyarakat.